

EDISI : Rabu, 13 Maret 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

Nama Media : POS BALI

Kategori : RETRIBUSI SAMPAH

20 Ribu Pelanggan PDAM Buleleng Dipunguti Retribusi Sampah

BULELENG, POS BALI – Kerja sama yang dibangun antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng dengan PDAM Buleleng dalam melakukan pemungutan retribusi sampah sebesar Rp5 ribu per bulan khusus untuk pelanggan PDAM Buleleng di 19 Kelurahan/Desa di Kabupaten Buleleng diyakini mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi pelayanan sampah.

Kerja sama ini menindaklanjuti Perda No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Dimana, PDAM

Buleleng hanya sifatnya membantu dalam rangka pemungutan retribusi sampah, yang dibayarkan oleh pelanggan PDAM kategori pelanggan rumah tangga, baik secara online maupun pembayaran langsung melalui loket PDAM Buleleng.

Adapun 19 kelurahan/desa yang dipunguti retribusi sampah sebesar Rp5 ribu per bulan di antaranya Kampung Singaraja, Banjar Jawa, Astina, Kendran, Banjar Bali, Kampung Baru, Kampung Kajanan, Kampung Anyar, Kampung Bugis, Banyuasri, Kaliuntu, Banjar Tegal, Paket Agung, Beratan, Baktiseraga, Banyuning, Liligundi, Penarukan, dan Sukasada.



POS BALURIK
DIRUT PDAM Buleleng, Made Lestariana.

Direktur Utama (Dirut) PDAM Buleleng, Made Lestariana mengatakan, saat ini jumlah pelanggan PDAM Buleleng mencapai 51 ribu lebih. Sedangkan, dari 19 Kelurahan/Desa yang kini dipunguti retribusi sampah sebesar Rp5 ribu itu sekitar 20 ribu pelanggan. "Anggap saja 80 persen bayar, masuknya bisa capai Rp80 juta. Diluar yang 19 itu masih ada (mendapat pelayanan persampahan, red). Sementara baru 19 itu dianggap DLH yang telah menerima layanan persampahan," katanya, Selasa (12/3).

Dalam kerjasama ini, sebenarnya pemungutan retribusi sampah ini dilaksanakan oleh DLH Buleleng. Hanya saja ditagihkan melalui reken-

ing PDAM Buleleng. "Saat ini bisa dilakukan pembayaran secara online. Ini bisa jadi potensi PAD retribusi sampah yang sebelumnya menurun karena hanya ditagih lewat karcis saat bayar di loket PDAM, sekarang bayar online juga sudah langsung ditagih," jelas Lestariana.

Dengan cara ini, Lestariana sangat yakin potensi peningkatan PAD dari sektor retribusi sampah yang ditagih melalui PDAM Buleleng akan meningkat, yang berasal dari 19 Kelurahan/Desa dari pelanggan kategori rumah tangga. "Total retribusi yang masuk nanti akan ke DLH. Ya, mungkin untuk kami nanti itu ada sejenis jasa," katanya.

Kendati demikian Lestariana mengakui ini baru tahap awal sehingga masih belum berjalan optimal. Sebab, semua potensi masih belum bisa diperoleh. Misalnya, pungutan retribusi sampah untuk pelanggan PDAM Buleleng yang kategori niaga dan pelanggan-pelanggan lainnya.

"Sekarang kan khusus rumah tangga saja. Tentunya berdasarkan Perda yang ada, masih banyak potensi-potensi yang nanti bisa diperoleh, khususnya bisa dari pelanggan niaga, pemerintah, dan sosial. Sehingga menurut saya, ini masih perlu diupayakan pemerintah untuk bisa meningkatkan PAD dari sektor retribusi sampah," pungkas Lestariana. 018

Nama Media : POS BALI

Kategori : HUT KOTA

Ribuan Ibu-ibu di Buleleng Bakal Menari Rejang Renteng Massal

■ Pada Puncak HUT Kota Singaraja

BULELENG, POS BALI - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Singaraja yang ke-415 tahun 2019 jatuh pada akhir Maret nanti, Panitia menetapkan beberapa agenda kegiatan untuk memeriahkan HUT Kota Singaraja yang kali ini mengusung tema yakni "Bersatu Merangkai Warna Nusantara".

Diantaranya, akan menampilkan atraksi seni budaya, olahraga, bhakti sosial, dan hiburan lainnya.

Dalam agenda tersebut, ada kegiatan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, akan digelar Tari Rejang Renteng massal yang diperkirakan akan melibatkan 7.400 penari yang menarik

Tari Rejang Renteng Massal. Di mana, ribuan penari tersebut berasal dari 145 desa/kelurahan se-Kabupaten Buleleng. Mereka akan menari selama 15 menit sepanjang Jalan Pramuka sampai Jalan Pahlawan Singaraja.

Sekretaris Dinas Kebudayaan (Disbud) Buleleng, Made Sudiarba mengatakan, dip-

ilihnya Tari Rejang Renteng secara massal pada puncak peringatan HUT Kota Singaraja itu, merujuk daripada hasil workshop di gedung Ksirarnawa Art Center Denpasar. "Ke depannya, Buleleng dipersiapkan jadi pioner Tari Rejang Renteng Wali," kata Sudiarba, Selasa (12/3) siang. Menurut Sudiarba, Tari rejang renteng

masal ini akan dibawakan oleh ibu-ibu PKK melalui partisipasi 145 desa/kelurahan se-Kabupaten Buleleng. Dan dimana, jumlah penari setiap desa/kelurahan itu sebanyak 50 orang. Untuk lokasi, lanjut kata Sudiarba menyebut akan mengambil start di sepanjang Jalan Pramuka sampai Jalan Pahlawan Singaraja. 018.

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : POS BALI

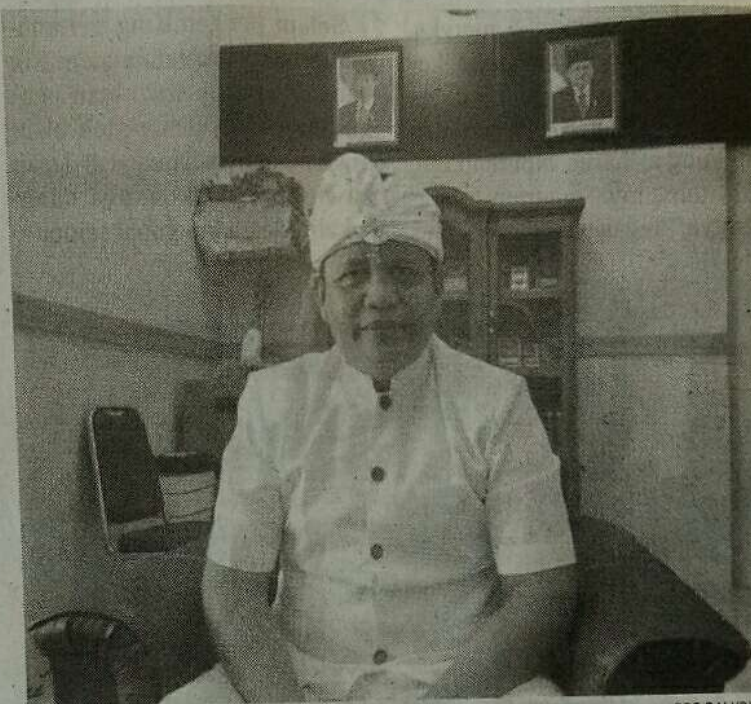
Kategori : GURU AGAMA HINDU

Perekrutan P3K di Buleleng, Masih Ada Guru Agama Hindu Belum Terakomodasi

BULELENG, POS BALI
Proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Buleleng memang dikhususkan bagi tenaga honorer (TH) eks K2 di Pemkab Buleleng yang telah tercatat di database Pemerintah Pusat. Hanya saja rekrutmen P3K tahap I ini belum mampu mengakomodasi sebagian guru khususnya guru agama Hindu yang tercatat di Kementerian Agama.

Wakil Ketua DPRD Buleleng, Made Adi Purnawijaya mengatakan, pihaknya sempat mendapatkan aspirasi dari sebagian guru agama Hindu yang masih tercatat di data Departemen Agama (Kementerian Agama) prihal keinginan mereka diangkat sebagai P3K. Guru-guru itu tersebar di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Buleleng.

"Mereka belum terakomodir, itu banyak terutama



POS BALI/RIK

KETUA DPRD Buleleng, Made Adi Purnawijaya.

guru agama terdaftar di Depag. Mereka mengabdikan diri di SD dan SMP sejak lama di Buleleng. Sedangkan aturan Pusat tentang kepegawaian, rekrutmen P3K hanya K2 yang ada

di Pemkab yang bisa mengikuti atau diangkat," kata Adi Purnawijaya, Selasa (12/3).

Menurut Adi, aspirasi dari mereka tersebut harus dipertanggungjawabkan. Seharusnya, kata

dia, Pemkab Buleleng melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKPSDM) Buleleng melakukan koordinasi ke Pusat untuk bisa mengakomodasi mereka. "Saya sudah sampaikan ke Sekda dan instansi yang mengurus kepegawaian di Buleleng. Seharusnya Pemkab koordinasi ke Pusat agar mereka terakomodir," jelas Adi Purnawijaya.

Ia mengaku akan membahas hal ini secara internal bersama Komisi-komisi di DPRD Buleleng yang terkait dengan kepegawaian termasuk guru sehingga persoalan ini dapat segera diakomodasi. Jika nantinya ada perekrutan P3K tahap II, maka mampu mengakomodasi mereka. "Banyak keluhan mereka yang disampaikan ke saya. Kami akan bahas ini, agar segera diakomodir dan mereka mendapatkan hak menjadi P3K," pungkas Adi Purnawijaya. 018